

## **Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Gorontalo**

### ***Community Participation in Recess for DPRD Members from the Gorontalo City National Mandate Party Fraction***

Heriyanto Thalib<sup>1</sup>, Marten Nusi<sup>2</sup>, Darmawaty Abd Razak<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia  
heriyantothalib19@gmail.com

#### **Abstrak**

Dalam setiap pelaksanaan reses anggota DPRD Fraksi PAN Kota Gorontalo ditemukan beberapa persoalan, salah satu yang paling dominan adalah partisipasi masyarakat yang masih kurang dari berbagai aspek. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo. Metode penelitian yang diterapkan adalah desain kualitatif. Observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi alat pengumpulan data penelitian. Informan ditentukan secara purposif dengan pertimbangan pengetahuan yang dimiliki terhadap fokus penelitian. Analisis data menggunakan formulasi Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo secara faktual dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu partisipasi dalam bentuk ide/gagasan dan partisipasi dalam bentuk fisik atau kehadiran pada setiap pelaksanaan reses. Partisipasi masyarakat berupa penyampaian ide atau usulan-usulan yang konstruktif secara umum belum begitu terlihat di tiga daerah pemilihan anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Gorontalo. 2) Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan reses terlihat pada beberapa hal, yaitu (1) komunikasi antara anggota DPRD dengan masyarakat. Komunikasi bukan hanya pada sisi penyampaian orasi anggota DPRD saat reses, namun juga pesan-pesan diawal sebagai media informasi perdana bagi masyarakat tentang reses. Pada dasarnya, hambatan itu berasal dari sisi apatisme masyarakat yang disebabkan oleh komunikasi dan tingkat pendidikan masyarakat.

Kata kunci: partisipasi masyarakat; reses; anggota DPRD

#### **Abstract**

*In every recess implementation of the Regional House of Representative members of the National Mandate Party faction of Gorontalo City, several problems are found, one of the most dominant is the lack of community participation from various aspects. This research aims to find and describe community participation in the recess implementation of the Regional House of Representative members of the National Mandate Party faction of Gorontalo City. The research method applied is qualitative design. Observation, interview, and documentation are the data collection tools in this study. Informants are determined purposively with consideration of their knowledge of the research focus. The data analysis employs Miles and Huberman's formulation. The results indicate that: 1) Community participation in the recess implementation of the Regional House of Representative members of the National Mandate Party faction of Gorontalo City can factually be seen through two approaches, namely participation in the form of ideas and participation in the form of physical attendance at each recess implementation. Community participation in the form of ideas or constructive proposals has generally not been seen in the three electoral districts of the Regional House of Representative members of the National Mandate Party faction of Gorontalo City. 2) Factors inhibiting community participation in the recess implementation can be seen in a few aspects,*

*including communication between the Regional House of Representative members and the community. Communication is not only in terms of the delivery of speeches by the Regional House of Representative members during recess but also messages at the beginning as the first information media for the community about recess. The obstacles essentially come from the apathy of the community caused by communication and the level of education of the community.*

*Keywords: community participation; recess; Regional House of Representative members*

## I. PENDAHULUAN

Desentralisasi pasca era reformasi telah membawa perubahan yang cukup besar pada segala bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu hal yang menjadi bagian dari perubahan akan adanya reformasi yaitu hadir ruang keterlibatan masyarakat pada level pengambilan kebijakan ditingkat daerah. Ruang partisipasi publik tersebut tercermin dalam seluruh proses atau tahapan pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi pembangunan. Partisipasi masyarakat secara luas mulai digulirkan paska pemberlakuan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih jelasnya terlihat pada model perumusan kebijakan pembangunan di daerah. Dalam kontes tersebut masyarakat hadir pada seluruh proses tahapan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi pembangunan (Ali et al., 2018; Fernanda, 2005; Widodo, 2001).

Prinsip dasar keterlibatan masyarakat pada proses pembangunan atau dengan kata lain adanya partisipasi masyarakat secara langsung memberikan dampak yang sangat baik bagi Demokrasi di Indonesia. Dalam prespektif mikro, ruang partisipasi masyarakat selama ini hanya dipandang pada proses pemilihan secara langsung saja, ketika adanya pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah masyarakat dituntut untuk berpartisipasi memberikan suaranya pada pemilihan umum atau lainnya, namun ada hal yang lebih esensial berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan masyarakat terkesan hanya menjadi pelengkap dari formalnya proses pembangunan (Hemafitria et al., 2021; Muslim, 2018; Tiwinariti, 2017; Tsaniyah, 2019; Wahyuni et al., 2015).

Dalam konteks kelembagaan pemerintahan, secara konseptual tatanan lembaga Negara telah melegitimasi hadirnya lembaga-lembaga Negara yang memiliki fungsi berbeda berdasarkan kewenangan dari masing-masing lembaga Negara tersebut. Teori pembagian kekuasaan dalam Negara telah menjelaskan akan hadirnya tiga lembaga Negara yang secara legitimasi saling memberikan pengaruh antara satu dengan lainnya. Lembaga Negara tersebut, yaitu Eksekutif yang menjalankan fungsi teknis pemerintahan, lembaga legislatif dengan fungsi keuangan, legislasasi dan pengawasannya, serta yudikatif dengan fungsi yuridisnya.

Salah satu lembaga Negara yang memiliki fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang legislasasi dan pengawasan, khususnya ditingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hadirnya lembaga DPRD selain sebagai bagian dari amanah undang-undang dasar dan salah satu

instrument Negara, dalam konteks Negara demokrasi kedudukan DPRD tidak bisa dilepaskan dengan kepentingan rakyat. Kedudukan anggota DPRD yang merupakan representasi rakyat telah membawa konsekuensi bahwa hal yang menyangkut kepentingan rakyat sebagai konstituennya harus menjadi prioritas kebijakan yang disuarakan melalui lembaga tersebut (Respationo, 2013; Rustamin & Dewi, 2016).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga pemerintahan yang mewakili masyarakat dalam mempengaruhi arah kebijakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh eksekutif, olehnya dalam implementasi tugas dan fungsinya DPRD memiliki tiga tugas dan fungsi urgen yang telah diatur dalam Undang-undang pemerintahan daerah Nomor 23 Tahun 2014, yaitu: fungsi legislasi dalam kaitannya dengan perumusan satu produk peraturan daerah, fungsi pengawasan yang dijabarkan melalui bentuk keterlibatan langsung pada upaya memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, sehingga bentuk pengawasannya bersifat secara komprehensif dan sistematis pada semua kebijakan, serta fungsi anggaran yang secara implementatif dijabarkan dalam bentuk pembahasan bersama pemerintahan daerah dalam penetapan rencana anggaran belanja daerah atau APBD.

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsinya selalu mengedepankan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh masing-masing anggota DPRD. Sebagai perwujudan perwakilan rakyat, maka kewajiban untuk menyerap aspirasi rakyat adalah hal yang penting dan harus dilaksanakan oleh anggota DPRD melalui program reses yang secara intens dilakukan. Reses adalah amanah undang-undang yang wajib dijalankan oleh anggota DPR, DPRD dengan tujuan untuk menyerap dan menghimpun suara masyarakat melalui kunjungan langsung ke daerah pemilihan masing-masing yang kemudian hasilnya menjadi bahan untuk diteruskan kepada pemerintah daerah melalui forum pengambilan kebijakan pembangunan di daerah.

Olehnya dalam proses reses yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat, baik berupa kehadiran, penyampaian ide atau gagasan serta harapan yang menyangkut kepentingan masyarakat sebagai konstituen. Permasalahan umum yang sering terjadi dalam pelaksanaan reses adalah kurangnya partisipasi masyarakat secara langsung pada kegiatan tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada pelaksanaan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo (Tiwinariti, 2017; Tsaniyah, 2019).

Berdasarkan fakta awal yang ditemukan oleh penulis, bahwa pada setiap pelaksanaan reses anggota DPRD Fraksi PAN Kota Gorontalo yang ada pada masing-masing dapil, selalu ditemukan beberapa permasalahan dan yang paling dominan terlihat adalah kurangnya partisipasi masyarakat secara langsung, baik berupa tenaga atau kehadiran pada kegiatan reses, partisipasi berupa penyampaian saran, ide atau gagasan pembangunan diwilayahnya masing-

masing, serta kurangnya pemahaman yang baik akan pentingnya reses untuk dihadiri sebagai bagian dari penyampaian aspirasi pada perwakilannya di pemerintahan. Terlebih lagi banyak masyarakat menganggap reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD adalah bagian dari pemberian bantuan berupa uang atau nilai barang secara langsung, padahal dapat dipahami bahwa reses adalah ajang tukar pendapat melalui diskusi kebijakan pembangunan yang akan dibawa dan dibahas oleh anggota DPRD bersama pemerintah daerah Kota Gorontalo.

Permasalahan-permasalahan tersebut sebagaimana dijelaskan diatas akan memberikan penilaian yang kurang baik akan kinerja anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Gorontalo, karena akan dianggap kurang maksimal dalam penyerapan aspirasi pada masyarakat, selain itu dapat berdampak pada kurangnya reperensi anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo pada saat pembahasan rancangan program bersama pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Gorontalo.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penulis telah menguraikan fenomena dan lokus penelitian sebagaimana tertuang dilatar belakang penelitian ini. Olenya berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi obyek penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah berupaya untuk menggambarkan atau mendiskrpsikan temuan penelitian secara objektif sesuai dengan fokus kajian penelitian. Olehnya penilitian ini termaksud kedalam jenis penelitian Kualitaif. Hal ini sesuai denga apa yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008) bahwa penelitian Kualitatif adalah merupakan penelitian dengan variable mandiri yang tidak memasukan variable lain sebagai pembanding yang hasilnya akan memberikan gambaran secara utuh kepada penulis (Sugiyono, 2013, 2014, 2016, 2018a, 2018b).

Informan yang diambil atau ditentukan oleh penulis dalam usulan penelitian ini adalah mereka yang dianggap mengetahui tentang fokus kajian atau apa yang ingin dikaji oleh penulis. Melalui teknik-teknik purposive sampling dimana Riduwan (2008, hal) menjelaskan bahwa penggunaan teknik puposive digunakan untuk mendapatkan informasi melalui informan, karena dianggap mengetahui fokus kajian penelitian. Beberapa informan tersebut adalah : anggota DPRD Fraksi PAN 2 orang, Ketua DPD PAN Kota Gorontalo 1 orang dan masyarakat dapil Pan 5 orang (Arikunto, 2010; Riduwan, 2018)

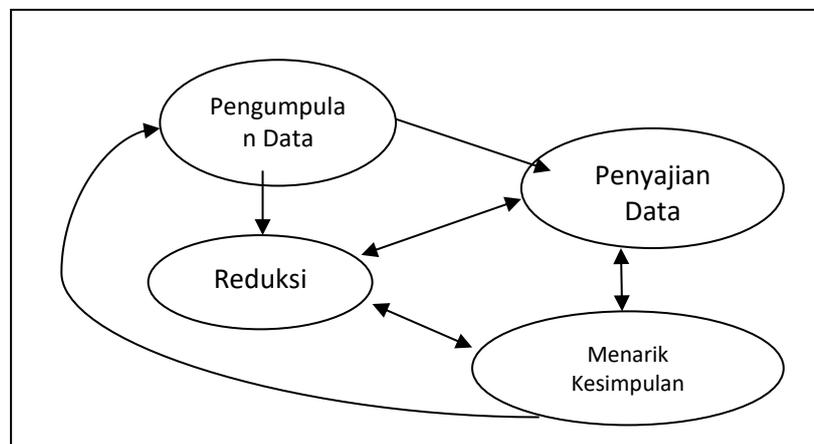
Sumber data dalam penelitian ini adalah: Primer, adalah : data yang diperoleh oleh penlusi melalui wawancara dan observasi langsung dilapangan.

Sekunder, adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis berupa dokumen-dokumen yang dianggap penting dan relevan dengan apa yang diteliti.

Untuk memperoleh data dilapangan, maka terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam upaya proses pengumpulan data, yaitu : Wawancara, Observasi atau pengamatan, dan Dokumentasi

Analisis data kualitatif digunakan oleh peneliti pada saat melakukan pengumpulan data berlangsung dilapangan, maupun setelah melakukan penelitian. Upaya untuk menggunakan analisis data dengan melihat beberapa teori tentang metode analisis yang ada, maka penulis menggunakan teknis analisis data sebagaimana yang pendapat Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018b) yang membagi empat hal penting dalam analisis data kualitatif, yaitu : Pengumpulan Data; Reduksi Data; Penyajian Data dan Verifikasi

Komponen-komponen analisa data model interaktif tersebut diatas dapat disajikan dalam bentuk skema gambar 1.



Sumber: Miles dan A. Michael Huberman diterjemahkan oleh (Sugiyono 2008).

Gambar 1 komponen dalam analisis data: model interaktif

Keabsahan data merupakan konsep yang sangat penting untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu : 1) Derajat kepercayaan (*credibility*); 2) Keteralihan (*transferability*); 3) Kebergantungan (*dependability*); 4) Kepastian (*confirmability*).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi penelitian ini didasari pada daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo. Dimana terdapat tiga lokasi berbeda sebagai daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Fraksi Amanat Nasional Kota Gorontalo, yaitu Dapil Kecamatan Hulonthalangi dan Kota Selatan, Dapil Kecamatan Kota Utara, Kota Tengah dan Kecamatan Sibatana, serta daerah pemilihan Kecamatan Kota Barat dan

Kecamatan Dungingi. Ketiga daerah pemilihan tersebut diisi oleh tiga anggota fraksi partai amanat nasional (PAN) DPRD Kota Gorontalo dengan representasi masing-masing konstituen yang berbeda-beda.

## **Hasil Penelitian**

Prespektif dalam keterwakilan dewan untuk merepresentasikan keinginan masyarakat dalam konteks kebijakan publik harus dipahami secara komprehensif oleh para wakil rakyat dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Dalam konteks regulatif upaya mewujudkan keinginan masyarakat sebagai konstituen oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan melalui serap aspirasi langsung di lapangan melalui beberapa metode yang salah satunya adalah melalui Reses (Bake, 2022; Fattah, 2018; Hidayatullah & Pribadi, 2016; Sembiring, 2017). Fraksi Amanat Nasional (PAN) di DPRD Kota Gorontalo sebagai representasi masyarakat di dewan juga melaksanakan hal yang sama. Pelaksanaan reses mutlaknya harus mengedepankan aspek keterlibatan masyarakat dalam setiap prosesnya, mulai dari kehadiran, sampai pada penyampaian pendapat atau aspirasi yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh setiap anggota dewan pada forum-forum pengambilan kebijakan.

### **1. Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Reses.**

Dalam hasil penelitian yang diperoleh di lapangan oleh peneliti dengan melihat partisipasi masyarakat dalam proses reses yang dilaksanakan oleh anggota dewan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo melalui beberapa indikator tentang partisipasi masyarakat, diantaranya :

#### **a. Partisipasi Berupa Ide atau Gagasan Dalam Reses.**

Forum reses yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Kota Gorontalo fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) selama masa periode yang ada adalah forum resmi Dewan yang secara regulatif telah diatur untuk melakukan serap aspirasi setiap konstituen yang ada dalam wilayah pemilihannya. Berdasarkan temuan berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa ulasan yang dijelaskan oleh para informan, diantaranya :

Wawancara bersama salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo yang menjelaskan bahwa :

“Untuk setiap reses yang kami lakukan di wilayah pemilihan saya pada khususnya, tentu aspek proseduralnya selalu dikedepankan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Satu hal yang pasti dalam reses itu adalah penting keterlibatan masyarakat dalam forum tersebut. Keterlibatan itu bukan hanya berupa kehadiran saja, namun lebih dari itu adalah bentuk penyampaian ide dan gagasan yang penting disampaikan sebagai aspirasi yang akan kami bawa di forum dewan nanti. Khusus untuk reses yang saya lakukan cukup variatif ya untuk penyampaian ide dan gagasan setiap masyarakat, ada tempat reses yang saya lakukan kurang masukan, ide atau gagasan aspirasinya, namun ada juga titik reses lain yang

masyarakatnya cukup aktif dalam penyampaian gagasannya.” (Wawancara, 9 Januari 2023)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama anggota dewan lainnya dari fraksi Partai Amanat Nasional dari dapil yang berbeda yang menyebutkan bahwa :

“Untuk partisipasi masyarakat dalam penyampaian usulan di beberapa kegiatan reses yang saya laksanakan memang cukup rendah, hal ini menurut saya tidak lepas juga dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk hadir pada pelaksanaan reses. Di beberapa kesempatan saat saya melaksanakan reses memang ada wujud konkrit masyarakat yang hadir dalam bentuk ide dan gagasan, mereka menyampaikan usulan-usulan yang produktif untuk diperjuangkan oleh saya di dewan nanti melalui fraksi kami. Salah satunya misalnya usulan perbaikan jalan yang ada disalah satu ruas jalan sipatana. Mereka secara kolektif menyampaikan itu direses dan saya sudah usulkan melalui rapat bersama dengan pemerintah daerah Kota Gorontalo.” (Wawancara, 10, Januari 2023)

Keterangan lain juga penulis dapatkan melalui wawancara bersama informan masyarakat, dimana salah satu masyarakat yang ada di Kelurahan Biawu menjelaskan bahwa :

“Kami ini diundang untuk mengikuti reses anggota DPRD yang kami pilih, yaitu bapak HT, tentu kami sebagai warga wajib hadir pada pelaksanaan reses tersebut, mengingat itulah forum resmi kami sebagai konstituen untuk menyuarakan aspirasi kami. Memang kami sadar tidak semua warga ikut menyampaikan keluhan dan masukannya, namun saya secara pribadi selalu menyampaikan usulan pada setiap pertemuan reses dengan pak HT. Saya pernah mengusulkan pembuatan Plat deker di wilayah kami itu sudah menjadi keluhan umum masyarakat yang ada disini”. (Wawancara, 12 Januari 2023).

Informan masyarakat lainnya juga saat diwawancarai juga menyebutkan bahwa :

“Saya secara pribadi hadir pada setiap reses yang dilaksanakan oleh Pak AP, sebagai perwakilan kami di DPRD Kota Gorontalo dari PAN. Kenapa saya hadir, karena saya sadar ini adalah kesempatan warga untuk bertemu dengan anggota dewan yang dipilihnya pada pemilu 2019 lalu dan ini kesempatan untuk menyampaikan unek-unek warga. Warga disini Alhamdulillah aktif menyampaikan gagasan atau ide-idenya ke anggota DPRD yang melaksanakan reses. Banyak usulan-usulan yang disampaikan agar dipertimbangkan untuk dibawa pada forum DPRD dan diperjuangkan disana. Kami hanya berharap agar usulan-usulan kami itu diperjuangkan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan harapan warga”. (Wawancara, 14 Januari 2023).

Dari beberapa informan yang dijelaskan diatas tentang adanya partisipasi masyarakat berupa ide dan gagasan dalam reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Fraksi PAN Kota Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo secara faktual telah berjalan dengan baik. Dalam hasil wawancara yang diperoleh bersama informan

disebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam hal penyampaian ide atau gagasan, serta pemberian usulan-usulan kegiatan kepada anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo belum sepenuhnya memenuhi harapan. Hal tersebut disebabkan oleh masih adanya sikap apatisme masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan reses dan bahkan adanya masyarakat yang kurang terlibat dalam hal tersebut.

Namun pada hasil informan lainnya, yaitu masyarakat yang diwawancarai oleh peneliti menjelaskan bahwa adanya bentuk penyampaian usulan atau aspirasi dalam reses yang dilaksanakan telah dilakukan, artinya bahwa masyarakat disebagian lokasi pelaksanaan reses cukup aktif dalam menyampaikan ide dan gagasannya dalam rangka usulan kegiatan yang akan berdampak pada pembangunan diwilayahnya. Adapaun hasil reses terbut menjadi bagian penting yang harus diperjuangkan oleh anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo pada forum-forum musyawarah pengambilan kebijakan ditingkat DPRD.

#### **b. Partisipasi Dalam Bentuk Fisik Atau Kehadiran.**

Hal yang paling dituntut dalam pelaksanaan reses adalah adanya kehadiran masyarakat. Hasil penelitian berupa wawancara tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk fisik atau kehadiran yang diperoleh oleh peneliti melalui beberapa informan diantaranya :

Hasil wawancara bersama salah satu anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyebutkan bahwa :

“Untuk kehadiran masyarakat pada setiap reses yang saya laksanakan Alhamdulillah selalu ada. Masyarakat disebagian tempat pelaksanaan reses sangat banyak yang hadir, sekalipun ada beberapa tempat yang saya laksanakan masyarakatnya kurang maksimal kehadiran, padahal sudah saya sampaikan undangannya jauh hari sebelum pelaksanaan reses. Saya berharap kehadiran masyarakat ini bisa terus bertambah, karena ini adalah forum resmi warga untuk menyampaikan unek-uneknya atau minimal masyarakat sadar bahwa kami sebagai perwakilan mereka di dewan selalu ada untuk mereka”. (Wawancara, 16 Januari2023).

Hal yang sama diungkapkan oleh anggota dewan lainnya, yaitu bapak HH yang sempat diwawancarai oleh peneliti tentang partisipasi masyarakat pada pelaksanaan reses yang dilaksanakan dalam periode masa sidang, yang menjelaskan bahwa :

“Kalau didapil saya memang masyarakat ini beragam ya, ada tempat reses yang masyarakatnya banyak yang hadir ada juga yang kehadirannya kurang maksimal, padahal saya sendiri bersama tim sudah membagikan undangan untuk masyarakat. Saya pribadi berpendapat bahwa kehadiran masyarakat pada pelaksanaan reses ini memiliki arti yang sangat penting, buat apa kita adakan reses kalau masyarakat saja tidak ada yang hadir. Sikap apatis masyarakat ini harus dirubah, maensetnya harus dirubah, karena walau bagaimanapun reses

ini adalah forum warga yang diharapkan akan mendapatkan masukan guna keberlanjutan pembangunan di daerah". (wawancara, 10 Januari2023).

Sama halnya dengan keterangan diatas, salah satu warga yang sempat diwawancarai oleh peneliti menyebutkan bahwa :

"Dalam pandangan saya memang reses ini belum maksimal dilaksanakan, salah satunya dapat dilihat pada kehadiran masyarakat. Di wilayah saya misalnya pada setiap reses belum sepenuhnya dihadiri oleh masyarakat. Ada persepsi masyarakat yang perlu untuk dirubah juga terkait reses, karena saya mendengar ada masyarkat yang bertanya apakah reses ini mendapatkan uang duduk atau tidak, itu yang ada dipikiran mereka, padahal reses itukan jelas kegiatan serap aspirasi masyarakat bagi setiap anggota dewan. Ini tanggung jawab anggota dewan untuk meluruskan persepsi itu. Sehingga jangan heran kenapa masyarakat cukup apatis untuk hadir." (Wawancara, 17 Januari2023).

Warga masyarakat lainnya yang ada di Kecamatan Hulonthalagi yang merupakan dapil salah satu anggota dewan Fraksi PAN lainnya juga diwawancarai oleh peneliti tentang partisipasi masyarakat berupa kehadirannya pada pelaksanaan reses yang dilakukan, menyebutkan bahwa :

"Kalau saya lihat masyarakat di kelurahan ini kalau dilaksanakan reses kehadirannya, mungkin waktu reses itu yang harus dikondisikan pelaksanaannya supaya warga juga bisa hadir, kadang waktunya dilaksanakan pagi hari, padahal banyak warga yang bekerja, baiknya dilaksanakan pada sore hari. Perlu upaya maksimal dari tim anggota dewan tersebut untuk mensosialisasikan waktu pelaksanaan reses dan bisa lebih maksimal dalam menghadirkan warga" (Wawancara. 18 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam hal kehadiran pada pelaksanaan reses yang dilaksanakan oleh anggota dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) secara umum sudah cukup terlihat, artinya bahwa kehadiran masyarakat pada setiap reses cukup beragam, pada wilayah lain tidak maskimal kehadirannya, namun pada tempat lainnya masyarakat yang hadir cukup maksimal. Ada hal yang perlu mendapat perhatian dari anggota dewan Fraksi PAN yang melaksanakan reses untuk memperhatikan sisi sosialisasi pada warga. Prespektif masyarakat terkait dengan reses juga menajdi bagian yang diperoleh pada wawancara peneliti dengan informan.

## **2. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Reses.**

Pada hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti tentang partisipasi masyarakat pada pelaksanaan reses anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo, berupa faktor penghambat, diperoleh beberapa inofrmasi dari informan-informan, diantaranya :

Hasil wawancara bersama salah satu anggota DPRD Fraksi PAN Kota Gorontalo Pak AP menjelaskan bahwa :

"Pada dasarnya kami dilapangan itu cukup dinamis ya pelaksanaan resesnya, artinya ada saja hambatan dan tantangannya. Kalau bicara tantangan ada beberapa yang kami hadapi, diantaranya kurangnya sisi pemahaman masyarakat tentang urgensi pelaksanaan reses, itu menyebabkan sikap apatisme

mereka mengikuti reses, dilain sisi juga dari sisi tingkat pendidikan juga cukup berpengaruh menurut saya, karena masyarakat cenderung menghindari dan bahkan tidak paham saat mendengarkan orasi reses yang disampaikan” (Wawancara, 10 Januari 2023).

Hal yang sama peneliti dapatkan dari wawancara bersama anggota DPRD Fraksi PAN lainnya, bapak HH yang menjelaskan tentang hambatan dalam pelaksanaan reses, yaitu :

“Saya sendiri melaksanakan reses secara umum sih lancar-lancar saja, namun memang kalau mengharapkan kehadiran masyarakat secara maksimal itu cukup susah. Faktor komunikasi juga saya lihat juga menjadi penyebabnya, yaitu menyampaikan informasi sebaik mungkin ke masyarakat berupa undangan dan bahkan hal-hal yang mereka mau usulkan juga kurang terlihat. Nah ini merupakan tantangan bagi kami sebenarnya, sehingga kedepan baru memperbaiki kendala-kendala dilapangan, termaksud komunikasi dengan masyarakat”. (Wawancara, 11 Januari 2023).

Masyarakat yang diwawancara oleh peneliti juga menyampaikan bahwa ada saja beberapa kendala yang terlihat dalam pelaksanaan reses, salah satu masyarakat sebagai informan menyebutkan bahwa :

“Kalau bicara kendala kami lihat sih hanya pada faktor sosialisasi dan komunikasi yang perlu dibangun secara baik antara anggota DPRD dengan masyarakat sekitar, ini penting karena masyarakat kadang tidak percaya atau bahkan tidak peduli pada kegiatan-kegiatan reses, mereka kurang memahami apa esensi reses itu sebenarnya” (Wawancara, 13 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan reses oleh anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo adalah terdapat pada beberapa hal, yaitu faktor komunikasi, berupa sosialisasi kegiatan, tingkat pendidikan yang mempengaruhi motivasi masyarakat untuk hadir pada pelaksanaan reses, serta beberapa kendala lainnya yang dianggap menjadi bagian penting dari tugas anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk diperbaiki.

## **Pembahasan.**

Konsep utama pada pelaksanaan reses adalah memwadahi masyarakat untuk ikut serta menyampaikan usulan-usulan konstruktif dalam rangka mempercepat pembangunan daerah, khususnya hal-hal yang berkepentingan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu esensi lain dari pelaksanaan reses adalah bertemunya antara anggota DPRD dengan masyarakat yang memilihnya sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing. Hal ini tentu menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak, baik itu anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu sendiri sebagai

pelaksana kegiatan, maupun masyarakat sebagai obyek utama dari pelaksanaan reses.

Dari hasil penelitian sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya berupa beberapa indikator partisipasi masyarakat pada pelaksanaan reses anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo yang dilihat pada dua pendekatan yaitu partisipasi dalam bentuk ide dan gagasan, maupun partisipasi dalam bentuk fisik atau kehadiran pada setiap pelaksanaan reses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berupa penyampaian ide atau usulan-usulan yang konstruktif secara umum belum begitu terlihat pada tiga daerah pemilihan yang terdapat anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Gorontalo.

Ide dan gagasan sejatinya adalah pesan informatif yang urgen untuk diutarakan pada setiap kesempatan, apapun bentuknya yang membutuhkan referensi yang konstruktif guna membentuk kesepahaman dalam pembangunan untuk kemajuan. Prinsip dasar pemberian usulan dan gagasan adalah sebagai bagian dari tujuan dilaksanakannya forum reses. Kontruksi pengambilan kebijakan pembangunan pada level DPRD adalah serapan aspirasi dari tingkat bawah yaitu masyarakat yang dikumpulkan oleh seluruh anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihan masing-masing yang kemudian diagendakan dalam rumusan kebijakan bersama untuk diparipurnakan.

(Wasistiono, S., dan Wiyoso, 2009) menjelaskan bahwa proses jaring aspirasi pada kegiatan reses adalah berkaitan dengan kegiatan membuka peluang bagi warga masyarakat tanpa membedakan ras, serta latar belakang masyarakat sebagai akuntabilitas bagi masyarakat, untuk membentuk sebuah kerjasama antara masyarakat dengan wakilnya.

Partisipasi masyarakat secara konsepsi adalah bentuk kesukarelaan masyarakat untuk terlibat secara aktif pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik dalam bentuk sosial, pembangunan, serta forum-forum pertemuan yang akan berimplikasi pada pencapaian tujuan kegiatan. (Anthonius Ibori, 2013) menjelaskan bahwa salah satu hal penting dalam partisipasi adalah faktor pemberian ide dan gagasan, serta keikutsertaan secara aktif pada kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator lainnya sebagai bagian dari pendekatan fokus penelitian adalah faktor partisipasi kehadiran masyarakat pada setiap reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo adalah partisipasi dalam bentuk kehadiran secara langsung. Tujuan dilaksanakan reses salah satunya adalah sebagai ajang tatap muka antara anggota DPRD dengan konstituennya. Olehnya kehadiran yang maksimal berdasarkan undangan yang disebar oleh anggota DPRD tersebut harus benar-benar terepresentasikan melalui kehadiran fisik secara langsung. Fakta empirik yang diperoleh menunjukkan bahwa kehadiran masyarakat pada pelaksanaan reses anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Gorontalo cukup dinamis, dimana pada sebagian tempat tingkat partisipasi masyarakat untuk hadir cukup maksimal, namun pada sebagian tempat lainnya terlihat kurang maksimal. Upaya yang sungguh-sungguh

dari tim pelaksana reses harus dilakukan, baik berupa sosialisasi, mengedukasi masyarakat untuk kepentingan reses merupakan langkah strategi penting untuk dilaksanakan.

Hambatan-hambatan yang muncul sebagai bagian dari proses pelaksanaan reses oleh anggota DPRD Fraksi PAN seperti halnya komunikasi adalah tantangan tersendiri yang harus diperbaiki kedepan oleh anggota DPRD yang ada pada setiap daerah pemilihan. Komunikasi menjadi media penting untuk diperhatikan bagi setiap orang, mengingat kesamaan perspektif itu akan berdampak pada pencapaian tujuan dari satu kegiatan atau kebijakan yang dilaksanakan. (Edward III, 1980) dalam (Nugroho 2012) menjelaskan bahwa komunikasi menjadi instrumen penting dari tujuan kebijakan organisasi. Komunikasi yang baik akan mencerminkan kesepahaman setiap orang yang ada dalam organisasi (Kegiatan et al., 2019).

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah : 1) Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Gorontalo secara faktual indikator partisipasi masyarakat pada pelaksanaan reses anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Gorontalo yang dilihat pada dua pendekatan yaitu partisipasi dalam bentuk ide dan gagasan, maupun partisipasi dalam bentuk fisik atau kehadiran pada setiap pelaksanaan reses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berupa penyampaian ide atau usulan-usulan yang konstruktif secara umum belum begitu terlihat pada tiga daerah pemilihan yang terdapat anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Gorontalo.; 2) Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan reses terlihat pada beberapa hal, yaitu faktor komunikasi antara anggota DPRD dengan masyarakat. Komunikasi bukan hanya pada sisi penyampaian orasi anggota DPRD saat reses namun juga pesan-pesan diawal sebagai media informasi perdana bagi masyarakat tentang reses. Problem yang muncul dilapangan tentang sisi apatisme masyarakat disebabkan oleh komunikasi dan tingkat pendidikan masyarakat. Sebagai saran yang dapat disampaikan oleh peneliti dalam penelitian ini tidak terlepas dari apa yang sudah diuraikan pada bab dan sub bab sebelumnya tentang hasil penelitian yang diperoleh. Olehnya sebagai saran tersebut adalah : 1) Perspektif akan keberlangsungan kegiatan reses harus dipahami secara komprehensif oleh pelaksana kegiatan akan pentingnya partisipasi masyarakat didalamnya. Partisipasi masyarakat harus digalakan melalui pendekatan-pendekatan yang lebih inovatif baik dalam bentuk komunikasi intens, pemberian informasi secara terus-menerus, mengedukasi dalam bentuk persuasif serta berupaya menghasilkan bentuk kegiatan reses yang berbeda dari pada umumnya, sehingga dapat memancing keikutsertaan masyarakat untuk turut berpartisipasi; 2) Problematika yang muncul dalam pelaksanaan reses harus diidentifikasi secara

rutin dan dilakukan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk dilakukan perbaikan. Ruang partisipasi publik pada setiap proses pelaksanaan reses tidak boleh hanya dipahami pada tuntutan akan formalitas reses, namun lebih dari itu harus dipersepsikan dalam bentuk konkrit bahwa reses adalah kebutuhan bersama antara anggota DPDR Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Gorontalo dengan masyarakat sebagai konsituennya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Amil, A., & Zulhadi, Z. (2018). Implementasi Kebijakan Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ulul Albab*, 22(2), 6–12. <https://doi.org/10.31764/jua.v22i1.579>
- Anthonius Ibori. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Tembuni Kabupaten Teluk Bintuni. *Journal Governance*, 5(1), 90–100.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI (ed.)). Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Bake, J. (2022). *Efektifitas Pelaksanaan Reses Anggota Legislatif Dalam Penanganan Permasalahan Publik ( Studi Kasus Komisi I Dprd Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ) the Effectiveness of Implementation of the Legislative Member ' S Recess in Handling Public Problem*. 13(2), 211–219.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. USA: Congressional Quarterly Inc.
- Fattah, I. (2018). *Masuk Dalam Tata Tertib Dprd Kota Parepare*. 2(2).
- Fernanda, D. (2005). *Pengantar Konsep dan Ruang Lingkup Pelayanan Publik*. 4–19.
- Hemafitria, H., Novianty, F. N. F., & Fitriani, F. (2021). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.45310>
- Hidayatullah, H., & Pribadi, U. (2016). Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 339–367. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0062>
- Kegiatan, S., Reses, M., Dprd, A., Partai, F., Pembangunan, P., & Malik, R. A. (2019). *Komunikasi Politik*.
- Muslim. (2018). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Gelombang Ketiga*. Indocamp.
- Respationo, H. M. S. (2013). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral. *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral*, 42(3), 356–361. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.356-361>
- Riduwan. (2018). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Alfabeta.

- Rustamin, Z., & Dewi, A. P. (2016). Sistem Pengarsipan Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada Kantor Sekretariat Dprd Provinsi Sulawesi Tenggara Menggunakan Borland Delphi 7. *Simtek : Jurnal Sistem Informasi Dan Teknik Komputer*, 1(2), 165–172. <https://doi.org/10.51876/simtek.v1i2.21>
- Sembiring, E. Z. (2017). *ANALISIS RESPON MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN RESES DPRD KOTA MEDAN TAHUN 2016 DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK ( Studi pada Masyarakat Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ) PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ME.*
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta cv.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018a). *Memahami penelitian kualitatif.* Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. (2018b). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D.* Alfabeta.
- Tiwinariti. (2017). *Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali.*
- Tsaniyah, R. (2019). *Gaya kepemimpinan Kepala Desa; (Studi di Desa Karangtuten Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto).* Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Wahyuni, S., Sulardiono, B., & Hendarto, B. (2015). 191921-ID-strategi-pengembangan-ekowisata-mangrove. *Diponegoro Journal of Maquares*, 4(4), 66–70.
- Wasistiono, S., dan Wiyoso, Y. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).* Fokusmedia, Bandung.
- Widodo, J. (2001). *Good Governance. Telaah dari Dimensi, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah.* Insan Cendikiya.